

THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE, CAPITAL EXPENDITURE, ECONOMIC GROWTH OF GDP, GENERAL ALLOCATION FUNDS, FISCAL DECENTRALIZATION AND DIVERSIFICATION OF REGIONAL INCOME ON FISCAL STRESS

Icih, Asep Kurniawan, Rijal Fadillah

STIE Sutaatmadja Subang

iclh@stiesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 01-10-2021

Tgl. Diterima : 01-12-2021

Tersedia Online : 31-12--2021

Keywords:

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the effect of local revenue (PAD), regional spending, economic growth (GRDP), general allocation funds, fiscal decentralization and diversification of regional income towards fiscal pressure on districts / cities in West Java Province.

This study uses data from West Java which consists of 18 districts and 9 cities which have been observed for 5 years. This study used descriptive statistical analysis methods, multiple regression analysis and tested classical assumptions: normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and automatic correlation.

PENDAHULUAN

Reformasi 1998 merupakan awal kehidupan baru bagi dunia politik di Indonesia, gerakan ini telah melahirkan otonomi daerah yang menjadi alat baru mencapai tujuan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Menurut Suprianto (2020, hlm. 1) Otonomi daerah merupakan buah dari reformasi yang ada sejak tahun 1998, namun otonomi daerah bukanlah tujuan final, namun sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang utama yakni masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Otonomi daerah adalah sebuah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah yang bertujuan mengatur daerahnya itu sendiri. Sebagaimana telah terikrar dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 salah satu tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 menjadi toggak kebijakan otonomi daerah

dan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dari negara sentralis menjadi negara yang desentralistis.

Permbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil,

proporsional, demokratis, terbuka, dan efisien dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan mempertimbangkan kemauan, keadaan, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penyerahan keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi atas pelimpahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memfokuskan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut telah memberikan konsekuensi pada pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya daerah tersebut lebih mandiri baik dalam hal kewenangan maupun dalam hal pengelolaan keuangan. Tujuan dari pelimpahan kewenangan tersebut untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelimpahan kewenangan tersebut diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan yang tadinya dikelola pemerintah pusat menjadi dikelola oleh pemerintah daerah berupa penyerahan perpajakan maupun bantuan dana transfer. Sistem mekanisme penyaluran pada daerah didasarkan pada pertimbangan untuk mengurangi ketimpangan yang kemungkinan dapat terjadi di setiap daerah. Namun demikian, sampai saat ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti masih relatif tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan antar daerah di Indonesia.

Tingginya tingkat *fiscal stress* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Desentralisasi Fiskal, dan Diversifikasi Pendapatan Daerah.

Faktor yang pertama adalah Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi tingkat *fiscal stress* karena jika

pendapatannya tinggi maka akan bisa membiayai anggaran belanja daerah. Jika pertumbuhan PAD di suatu daerah meningkat, kemungkinan daerah tersebut mengalami *fiscal stress* akan rendah karena daerah tersebut mampu untuk membiayai belanja daerahnya. Namun sebaliknya jika pertumbuhan PAD di suatu daerah menurun, kemungkinan daerah tersebut mengalami *fiscal stress* akan tinggi karena daerah tersebut belum mampu untuk membiayai belanja daerahnya.

Faktor yang kedua adalah belanja modal, belanja modal termasuk kedalam belanja daerah yang juga menjadi faktor terjadinya *fiscal stress* di suatu daerah karena jika anggaran belanja modalnya tinggi, akan menambah pada belanja daerah. Tetapi jika pendapatan daerahnya kecil itu bisa menyebabkan *fiscal stress* karena pemerintah tidak bisa menutupi kekurangan tersebut.

Faktor yang ketiga adalah Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), jika kondisi pertumbuhan suatu daerah tersebut meningkat maka akan mempengaruhi pendapatan daerah tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2020) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB ini biasanya dijadikan sebagai acuan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu Pdrb juga dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah akan berdampak pada pendapatan yang akan berkurang dan itu berpengaruh terhadap anggaran belanja yang sebelumnya sudah dianggarkan menjadi tidak tercukupi. Hal itu lah yang menyebabkan tekanan anggaran (*fiscal stress*) karena pendapatan tidak dapat memenuhi anggaran belanja.

Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa



Barat, 2019

Faktor yang keempat adalah Dana Alokasi Umum (DAU), bisa di lihat di table 1.2 bahwa Pendapatan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan, namun Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi dibandingkan dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Menurut Purnaninthesa (2006) : “menyimpulkan bahwa *fiscal stress* pada suatu daerah dapat menyebabkan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.” Semakin tinggi tingkat *fiscal stress*, maka ada upaya daerah tersebut untuk meningkatkan kemandiriannya (PAD) yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi asli daerahnya yang salah satunya tercermin pada Pendapatan Asli Daerah.

Faktor yang kelima adalah Desentralisasi Fiskal. Istilah desentralisasi fiskal muncul pada tahun 2004 ketika pemerintah mengeluarkan UU no. 32 dan 34 mengenai adanya kewenangan daerah yang lebih mandiri. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong setiap daerah supaya dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya. Selain itu juga setiap daerah dituntut untuk bisa mandiri dalam mengelola berbagai macam urusan daerahnya itu sendiri seperti: mengelola sumber daya dan membuat laporan keuangan. Beberapa daerah termasuk sebagai daerah yang bagus karena memiliki sumber-sumber pendapatan yang memadai. Kemudian

kebijakan otonomi juga dapat mendukung daerah supaya bisa lebih mandiri. Ketika daerah tersebut sudah bisa mandiri kemungkinan mengalami tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih kecil.

Faktor yang keenam adalah Diversifikasi Pendapatan Daerah, ini bertujuan untuk mengoptimalkan setiap potensi sumber daya alam maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut dapat ditanggulangi dengan diversifikasi pendapatan daerah. Diversifikasi Pendapatan Daerah ditujukan untuk menambah pendapatan asli daerah dengan cara penganeekaragaman pendapatan yang sebelumnya belum ada. Diharapkan diversifikasi ini dapat menambah pendapatan asli daerah yang kemudian bisa membantu daerah tersebut dalam mengatasi *fiscal stress*.

Tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) terjadi akibat belanja lebih besar dari pendapatan. Ketika suatu daerah mengalami *fiscal stress* pada taun sebelumnya, maka pemerintah daerah sebaiknya lebih teliti lagi dalam menyusun anggaran pada tahun berikutnya supaya tidak terjadi lagi *fiscal stress*. Berikut disajikan Tabel 1.3 yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah (termasuk tekanan fiskal) di Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2019.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Jawa Barat Tahun 2019 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota		
Regency/City	Pendapatan	Belanja
	Revenue	Expenditure
1. Kab. Bogor	7.298.466	7.304.965
2. Kab. Sukabumi	3.762.187	3.832.177
3. Kab. Cianjur	4.017.389	4.000.993
4. Kab. Bandung	5.259.974	5.114.895

5 Kab. Garut	4.301.343	4.257.224
6 Kab. Tasikmalaya	3.557.974	3.463.278
7 Kab. Ciamis	2.573.609	2.602.915
8 Kab. Kuningan	2.469.670	2.508.505
9 Kab. Cirebon	3.683.068	3.681.465
10 Kab. Majalengka	2.817.585	2.777.362
11 Kab. Sumedang	2.749.911	2.689.967
12 Kab. Indramayu	3.338.765	3.250.490
13 Kab. Subang	2.841.063	2.759.422
14 Kab. Purwakarta	2.060.667	1.920.109
15 Kab. Karawang	4.188.371	4.315.267
16 Kab. Bekasi	5.437.268	5.057.701
17 Kab. Bandung Barat	2.602.111	2.643.896.
18 Kab. Pangandaran	1.137.142	1.161.646.
19 Kota Bogor	2.328.730	2.406.586
20 Kota Sukabumi	1.223.767	1.185.870
21 Kota Bandung	5.939.997	6.114.449
22 Kota Cirebon	1.422.710	1.425.813
23 Kota Bekasi	4.835.980	5.001.748
24 Kota Depok	2.940.266	2.765.083
25 Kota Cimahi	1.316.230	1.489.072
26 Kota Tasikmalaya	1.837.915	1.914.915
27 Kota Banjar	799.959	803.917.301
Total	86.742.131	86.449.742
Provinsi Jawa Barat	33.919.022	33.117.934

Tabel 1.1 diatas menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Dari table diatas terdapat 14 Kabupaten/Kota yang mengalami fiscal stress karena pengeluaran (belanja) lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. Hal tersebut terjadi karena kabupaten/kota tersebut kurang memaksimalkan potensi pendapatan yang ada di daerahnya

masing-masing dan ketergantungan terhadap dana perimbangan (dana transfer) dari Pemerintah Pusat.

Berikut ini daerah yang belanjanya lebih besar dari pendapatan daerah adalah: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Cimahi. Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.

Arnett (2011) menyebutkan bahwa Saldo Dana = selisih antara pendapatan dan belanja) menjadi penentu tingkat *Fiscal Stress* karena pendapatan dan belanja ini merupakan komponen yang utama. Pemerintah daerah harus terus berusaha dalam menghadapi permasalahan keuangan yang terjadi di setiap periodenya. Diharapkan setiap tahun pendapatan daerah terus meningkat supaya bisa menutup belanja daerahnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Iskandar Muda (2012) adalah terdapat tambahan 3 variabel independen yakni Dana Alokasi Umum (DAU), desentralisasi fiskal dan diversifikasi pendapatan daerah. Alasan peneliti tertarik meneliti tentang *fiscal stress* adalah untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan pendapatan di daerah yang ada di Jawa Barat dan masalah apa saja yang terjadi sehingga menyebabkan *fiscal stress*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan Daerah Terhadap *Fiscal Stress*."

1.2 Identifikasi Masalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress*?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap *Fiscal Stress*?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress*?

4. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress*?
5. Apakah Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress*?
6. Apakah Diversifikasi Pendapatan Daerah berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress*?
7. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal/Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*?

1.3 Tujuan Penelitian:

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *Fiscal Stress*.
2. Pengaruh Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress*.
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap *Fiscal Stress*.
4. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap *Fiscal Stress*.
5. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap *Fiscal Stress*.
6. Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Daerah terhadap *Fiscal Stress*.
7. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal/Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*?

1.4 Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan laporan ini dapat mencegah pemerintah daerah mengalami *fiscal stress*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai referensi laporan selanjutnya terkait pembahasan yang sama bagi pembaca dan menambah

wawasan penulis terkait pembahasan dari praktiknya.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Pengertian *stewardship theory* menurut Donalson dan Davis (1997) : *Stewardship Theory* didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal.” *Stewardship Theory* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manager tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Menurut Puspitawati (2016) : “Dengan demikian, teori ini berasumsi bahwa manajemen dipandang sebagai pihak yang memiliki integritas tinggi dan mampu melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya guna memenuhi kebutuhan stakeholder.”

Kaitan dari teori *stewardship* dengan penelitian ini yaitu bagaimana pemerintah selaku manager (*steward*) yang diberikan kepercayaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang sebelumnya sudah dibuat dan melaksanakan pengelolaan dengan baik.

Tugas selanjutnya yaitu melakukan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat mengerahkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya secara maksimal supaya mencapai kualitas laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan kebutuhan para pengguna (*stakeholder*).

Fiscal Stress

Kesadaran mengenai pengaruh penerimaan maupun pengeluaran pemerintah baru muncul belum lama dalam bidang ilmu pengetahuan, namun dengan disadarinya pengaruh-pengaruh tersebut maka munculah sebuah gagasan

yang dengan sengaja merubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk mencapai sebuah kestabilan ekonomi. Teknik mengubah ini yang saat ini kita kenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal atau dengan kata lain teknik mengubah pengeluaran dan pemasukan pada pemerintah. Menurut Bastian I (2001) : “Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka untuk membelankan uangnya guna mencapai tujuan Negara dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pembelanjaan pemerintah.”

Namun dalam pelaksanaannya kebijakan fiskal tentunya mengalami beberapa masalah seperti keterbatasan penerimaan (pendapatan asli daerah), belanja daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, desentralisasi fiskal dan diversifikasi pendapatan daerah.

Menurut Arnet (2011) menyebutkan bahwa *fiscal stress* adalah tekanan anggaran yang terjadi akibat pendapatan tidak bisa memenuhi kebutuhan belanja. Pemerintah daerah harus terus berusaha dalam menghadapi permasalahan keuangan yang terjadi di setiap periodenya. Diharapkan setiap tahun pendapatan daerah terus meningkat supaya bisa menutup belanja daerahnya.

Fiscal Stress dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

$$\text{Fiscal Stress} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah} - \text{Total Belanja}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang berisi catatan atas transaksi keuangan yang menghasilkan informasi mengenai kinerja keuangan entitas selama periode akuntansi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Koswara (2000) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut. Sejalan dengan itu, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Menurut Halim A (2004: 67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Menurut Firstanto (2015, hlm 41) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah dapat dihitung dengan melihat PAD tahun yang dicari (t) dikurangi PAD t-1 (tahun sebelumnya) kemudian dibagi dengan PAD tahun sebelumnya.

Pertumbuhan PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

$$PPAD(t) = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Pengertian Belanja Modal Menurut Halim (2004: 73), Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

Menurut Halim (2004: 73) (Tambahin ke dafpus) Kelompok belanja memiliki beberapa jenis baik untuk belanja aparatur daerah maupun pelayanan untuk publik. Adapun jenisnya sebagai berikut;:

- a) Belanja modal tanah
- b) Belanja modal jalan dan jembatan
- c) Belanja modal bangunan air (Irigasi)
- d) Belanja modal instalansi
- e) Belanja modal jaringan
- f) Belanja modal bangunan gedung
- g) Belanja modal monument
- h) Belanja modal alat-alat besar
- i) Belanja modal alat-alat angkutan
- j) Belanja modal alat-alat bengkel

Belanja modal merupakan salah satu indikator pengeluaran pemerintah, semakin tinggi belanja modal maka akan terjadi pengeluaran pemerintah yang tinggi. Biasanya setiap tahun belanja modal mengalami pertumbuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap daerah yang kian meningkat untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Menurut Firstanto (2015:42) mengungkapkan pertumbuhan belanja modal dapat dihitung berdasarkan belanja modal periode t kemudian dikurangi belanja modal periode t-1 (tahun sebelumnya) dan dibagi dengan belanja daerah periode t-1 (tahun sebelumnya). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

Belanja Modal dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

$$PBM(t) = \frac{BM_t - BM_{t-1}}{BM_{t-1}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Ekonomi Pdrb

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) : "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah." Pertumbuhan PDRB ini biasanya dijadikan sebagai acuan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu Pdrb juga dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Apabila pertumbuhan ekonomi pdrb di daerah tersebut mengalami peningkatan itu bisa berdampak pada meningkatnya pendapatan yang kemudian akan menjadi stabilnya APBD di daerah tersebut.

Namun jika pertumbuhan ekonomi pdrb rendah akan berdampak pada pendapatan yang akan berkurang dan itu berpengaruh terhadap anggaran belanja yang sebelumnya sudah di anggarkan menjadi tidak tercukupi. Hal itu lah yang menyebabkan tekanan anggaran (*fiscal stress*) karena pendapatan tidak dapat memenuhi anggaran belanja.

Menurut Firstanto (2015:41) menyatakan bahwa pertumbuhan Product Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung berdasarkan PDRB periode t kemudian dikurangi PDRB periode t-1 (tahun sebelumnya) kemudian dibagi dengan PDRB periode t-1 (tahun sebelumnya). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi pdrb dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

$$PPDRB(t) = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Umum

Menurut Bastian I (2001) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah "Dana Alokasi Umum merupakan dana yang didapatkan dari APBN yang dianggarkan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah dalam membiayai kebutuhan pembelanjannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."

Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut Bastian I (2001). adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) dapat ditetapkan dengan sekurang-kurangnya 25% dari pendapatan dalam

Negara yang telah ditetapkan pada APBN

2. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pada provinsi sebesar 10% dan untuk daerah kabupaten/kota 90% dari Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan untuk daerah kabupaten/kota tertentu dapat ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum pada seluruh daerah kabupten/kota yang telah ditetapkan di dalam APBN dengan porsi daerah yang bersangkutan

DAU dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

$$\text{DAU} = \text{DAU} / \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

Desentralisasi Fiskal

Pengertian Desentralisasi Fiskal menurut Mardiasmo (2018): “Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah memberikan dampak pada hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terjadinya pelimpahan kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyerahan kewenangan tersebut diikuti dengan beralihnya sumber-sumber pendanaan berupa pajak daerah maupun bantuan mekanisme transfer ke daerah. Mekanisme transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan untuk mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Adanya desentralisasi fiskal serta otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat juga perekonomian di daerah sebagai pendukung perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang diharapkan adalah yang sehat dan berkelanjutan.

Desentralisasi Fiskal dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

$$\text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

Diversifikasi Pendapatan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : “diversifikasi adalah penganebaran usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa atau investasi.” Pemerintah Daerah harus bisa berusaha supaya tidak mengandalkan bantuan dari pusat dengan cara melakukan diversifikasi pendapatan daerah.

Menurut Yan (2012) : “Pemerintah Daerah telah berpaling pada beberapa sumber Pendapatan Daerah pada masa sekarang untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada bantuan dari luar daerah.” Berdasarkan pendapat tersebut, untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari aktivitas ekonomi pada daerah, maka pemerintahan daerah harus dapat melakukan diversifikasi kepada pendapatan daerahnya. Karena pendapatan daerah yang memiliki berbagai jenis akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik jika dibandingkan hanya memiliki satu jenis sektor pada pendapatan daerah.

Diversifikasi pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

$$\text{Pendapatan Lain-lain PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap *Fiscal Stress*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah dari penghasilan di wilayahnya sendiri yang diambil berdasarkan peraturan daerah yang dibuat. Menurut Siregar B (2015) : “Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.”

Setiap daerah diminta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya masing-masing supaya daerah tersebut bisa berkembang dan bersaing dengan daerah lainnya dalam hal ekonomi dan pembangunan. Selain itu pendapatan juga supaya daerah tidak terlalu ketergantungan terhadap

pemerintah pusat, jika pendapatannya lebih besar daripada belanja maka tidak akan terjadi *fiscal stress* namun sebaliknya jika pendapatannya lebih kecil dari belanja maka akan terjadi tekanan fiskal (*fiscal stress*). Penelitian Muda I (2012) memberikan bukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Selain itu, penelitian Firstanto (2015) menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap *fiscal stress*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*

Pengaruh Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress*

Menurut Halim (2004: 73) “Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.”

Menurut Firstanto (2015) menyatakan bahwa “belanja modal seperti belanja pembangunan jangka pendek akan mempengaruhi anggaran belanja daerah menjadi lebih besar. Hal ini jika tidak diimbangi dengan pendapatan besar maka kemungkinan terkena tingkat *fiscal stress* akan cukup besar, mengingat *fiscal stress* di sini dicerminkan adanya selisih anggaran pendapatan dengan belanja.” Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah dapat mempengaruhi *Fiscal Stress*.

Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Firstanto (2015) yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan belanja modal berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H2: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap *fiscal stress*

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pdrb Terhadap *Fiscal Stress*

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS: 2019) : “Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.”

Menurut Adriana, dkk (2017, hlm: 49) menyatakan pertumbuhan ekonomi PDRB dijadikan sebagai acuan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. PDRB juga dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pendapatan di suatu daerah. Hal ini karena kewajiban masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi kepada daerah tergantung kepada aktivitas ekonomi yang masyarakat lakukan. Jika aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dan meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan.

Artinya dengan pertumbuhan ekonomi pdrb yang meningkat maka pendapatan daerahnya pun akan ikut meningkat dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup baik untuk membiayai belanja daerah. Maka kemungkinan daerah tersebut terkena *fiscal stress* akan kecil.

H3: Pertumbuhan Ekonomi pdrb berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap *Fiscal Stress*

Menurut Siregar B (2015) : “Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk kedalam Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jika dana alokasi umum naik maka kemungkinan *fiscal stress* nya akan turun karena dana alokasi umum akan membantu pendapatan daerah untuk menutupi kekurangan belanja. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ichan, 2018) yang menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi

Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja daerah.

H4: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap *Fiscal Stress*

Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkaitan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah menyatakan bahwa: "Pendapatan asli daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi."

Asas desentralisasi ini muncul sejalan dengan otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hak otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten maupun kota dilakukan dengan cara memberikan kewenangan atau diskresi yang nyata, luas serta bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Artinya pelimpahan tanggung jawab ini akan diikuti juga oleh pengaturan, pembagian, serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan juga pada perimbangan keuangan baik pusat dan daerah. Kewenangan perimbangan pusat ke daerah tentunya akan menimbulkan dampak positif dan negatif, dampak positifnya dengan adanya perimbangan ke

daerah akan membantu daerah tersebut dalam pendapatan namun dampak negatifnya daerah akan dituntut untuk mandiri dalam hal pendapatan artinya daerah tersebut harus bisa menggali potensi pendapatan asli daerahnya itu sendiri.

Jika daerah tersebut belum bisa mandiri maka bisa jadi akan menimbulkan defisit anggaran karena belanja daerah tiap tahun akan meningkat sesuai dengan kebutuhan atau yang biasa disebut *fiscal stress*.

H5: Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*

Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Daerah Terhadap *Fiscal Stress*

Menurut Yan (2012) : "Pemerintah Daerah telah berpaling pada beberapa sumber Pendapatan Daerah pada masa sekarang untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada bantuan dari luar daerah." "Berdasarkan pendapat tersebut, pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya dengan cara melakukan diversifikasi terhadap berbagai jenis pendapatan pada daerah, karena bagaimanapun, pendapatan daerah yang lebih beragam jenis akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik lagi jika dibandingkan dengan satu jenis pendapatan atau hanya pada satu sektor saja.

Berdasarkan hal tersebut, maka diversifikasi pendapatan daerah bisa meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan diharapkan pemerintah daerah akan bisa membiayai belanja daerahnya. Dengan kata lain, diversifikasi pendapatan daerah akan bisa mengatasi masalah pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi pendapatan daerah. Ketika pemerintah daerah sudah optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka kemungkinan daerah tersebut terkena *fiscal stress* akan kecil.

H6: Diversifikasi Pendapatan Daerah berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi PDRB, Dana Alokasi Umum,

Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan Terhadap *Fiscal Stress*

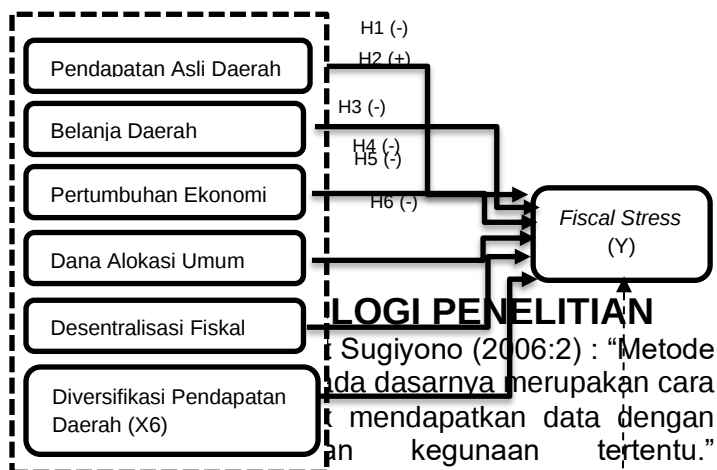
Berdasarkan pada penelitian terdahulu dan teori yang telah diuraikan diatas, maka faktor yang berkontribusi terhadap *fiscal stress* yaitu pendapatan asli daerah, belanja daerah, pertumbuhan ekonomi pdrb, dana alokasi umum, desentralisasi fiskal dan diversifikasi pendapatan daerah. Setelah dilakukan pengujian secara parsial, kemudian dilakukan pengujian secara simultan.

Adapun hubungan dari keenam faktor tersebut secara bersama-sama yaitu dengan terciptanya anggaran yang baik supaya terjadi keseimbangan antara anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran. Dalam pelaksanaan realisasi anggaran tersebut, pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan anggaran itu sesuai dengan tujuannya masing-masing sehingga anggaran yang sebelumnya sudah dapat menutupi belanja daerah dapat terpenuhi sehingga tidak terjadi defisit anggaran (*fiscal stress*).

Selain dari pendapatan dan belanja daerah, pertumbuhan ekonomi berkontribusi dalam membantu pemerintah daerah merealisasikan anggaran tersebut karena jika pertumbuhan ekonominya bagus/naik maka bisa menambah pendapatan daerah tersebut. Kemudian ada juga bantuan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah tersebut supaya tidak tertinggal dan juga bisa menambah anggaran pemerintah daerah.

Diterapkannya desentralisasi fiskal sebagai kebijakan pemerintah pusat yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah juga bisa mempengaruhi pemerintah daerah tersebut supaya bisa mandiri dan maju. Dalam desentralisasi fiskal pemerintah daerah dituntut untuk menggali peluang pendapatan yang ada di daerah tersebut supaya pendapatan daerah itu bisa beranekaragam dan tidak terpacu pada satu pendapatan saja atau biasa disebut dengan diversifikasi pendapatan daerah. Diharapkan dengan diterapkannya kebijakan ini pemerintah daerah bisa menghindari *fiscal stress*.

H7: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi PDRB, Dana Alokasi Umum, Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap *Fiscal Stress*.

Kerangka**Hipotesis**

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif Menurut Sugiyono (2006:8) :

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini merupakan data kuantitatif yang berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder juga berisi tentang informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dari setiap masing-masing daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat dari periode 2015-2019 yang mana data laporan keuangan tersebut diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Adapun teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Informasi yang dibutuhkan penelitian didapat dari buku, jurnal dan artikel terkait.
2. Laporan keuangan pemerintah daerah yang dibutuhkan penelitian didapat melalui pengunduhan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, Menurut Sugiyono (2014 : 85) : "sampel yang jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel."

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:80) : "mengartikan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya." Jadi populasi bukan hanya perihal orang, namun juga obyek yang lain. Populasi juga mencakup karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian banyaknya populasi yaitu 18 Kabupaten dan 9 Kota jadi totalnya ada 27 populasi. Berikut ini daftar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:63) : "Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.” Dalam penelitian ini variabel yang digunakan berupa variabel dependen dan variabel independen. Adapun variabel tersebut diuraikan sebagai berikut:

Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2016:64) : “Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Fiscal Stress*. Arnet (2011) menyebutkan bahwa *Fiscal Stress* merupakan tekanan anggaran (*fiscal*) yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran (belanja).

Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2016:64) : “Variabel Independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).” Penelitian ini menggunakan 6 variabel independen yaitu:

Pengertian analisis regresi berganda menurut Gujarati (2003), Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Menurut Ghozali (2018:96) : “Dalam analisis regresi berganda, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.” Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistic. Variabel independen/bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang).

Rumus: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$

Y = variabel terikat

a = konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi

X_1, X_2 = variabel bebas

Uji Asumsi Klasik

Menurut Kuncoro (2004) : “Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah dalam menganalisis data. Masalah tersebut dalam ekonometrika termasuk dalam pengujian asumsi klasik, yaitu ada tidaknya masalah multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas.” Pengujian asumsi klasik meliputi:

Metode Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali, (2019:19) : “Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).”

Analisis Regresi Berganda

Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018:161) : “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.” Uji t dan uji F menjelaskan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji Multikolonieritas

Menurut Ghazali (2018:107) : “Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.” Jika variabel independen saling berhubungan, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018:111), menyatakan bahwa “uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).” Apabila terjadi autokorelasi, maka data tersebut mengalami masalah yakni adanya keterkaitan waktu satu sama lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2018:137) : “Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.” Jika pada gambar heteroskedastisitas menyebar, maka data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian yang bagus adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Statistik Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2018:97) : “Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.” Rentang nilai R^2 adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti variabel independen tidak terlalu berkontribusi terhadap variabel dependen. Namun jika nilainya mendekati satu berarti variabel independen berkontribusi cukup banyak terhadap variabel dependen.

Uji Statistik F

Menurut Ghazali (2018:98) Uji F menguji joint hipotesa bahwa b_1 , b_2 dan b_3 secara bersama-sama sama dengan nol atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan . Apakah variabel Y berhubungan linear terhadap variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 dan X_6 . Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Uji Statistik t

Menurut Ghazali (2018:99) : “Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.” Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_i = 0$$

$$H_A : b_i \neq 0$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat periode 2015-2019. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 135 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Fokus penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi pdrb, dana alokasi umum, desentralisasi fiskal dan diversifikasi pendapatan daerah terhadap fiscal stress.

Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Metode pengambilan sampel dalam pengumpulan data yaitu sampel jenuh, dimana metode pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil semua anggota populasi yang ada.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari pengujian pada tabel yang menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov test tersebut terlihat besarnya nilai Signifikan adalah 0,200 dan nilainya jauh diatas $\alpha=0,05$. Dalam hal ini berarti H_0 ditolak yang berarti data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Dari hasil pengujian spss, terlihat bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), Pertumbuhan Ekonomi PDRB (X3), Dana Alokasi Umum (X4), Desentralisasi Fiskal (X5) dan Diversifikasi Pendapatan Daerah (X6) mempunyai angka *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah angka 10. Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk ke 6 (enam) variabel independen diatas tidak terdapat persoalan multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,536 dengan jumlah data sampel adalah 127 dan jumlah variabel independen adalah 6. Pada kondisi tersebut menghasilkan dl sebesar 1,3834 dan nilai du 1,5078. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,536 berada diantara nilai du 1,5078 sampai dengan 4-du 2,1875. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil olah data, maka disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y = tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga persamaan regresi layak dipakai

untuk memprediksi variabel dependen dan variabel independen.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil model dari hasil output SPSS versi 22 diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,349 atau 35%. Artinya variabel *Fiscal Stress* (Y) mampu dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), Pertumbuhan Ekonomi Pdrb (X3), Dana Alokasi Umum (X4), Desentralisasi Fiskal (X5) dan Diversifikasi Pendapatan Daerah (X6) sebesar 45%, sedangkan sisanya sebesar 65% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0,000, karena nilai Sig. $0,000 < 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F bahwa hipotesis diterima (variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen).

Uji t

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) didapatkan nilai t hitung sebesar 1,656 sehingga $t \text{ hitung } 1,656 < t \text{ table } 1,97867$

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant)	243947.554	95128.869		2.564	.011
X1	6.389	3.858	.122	1.656	.100
X2	-7.489	2.485	-.219	3.014	.003
X3	-67.131	68.284	-.072	-2.983	.027
X4	-13.976	17.429	-.094	-2.802	.024
X5	-70.760	13.312	-.651	-5.316	.000
X6	-17.716	18.801	-.073	-.942	.348

a. Dependent Variable: Fiscal Stress

dengan tingkat signifikansi 0,100 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak

berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress. Hal ini tidak mendukung hipotesis 1 atau hipotesis ditolak.

2. Variabel Belanja Modal (X2) didapatkan nilai t hitung sebesar 3,014 sehingga t hitung $3,014 > t$ table 1,97867 dengan tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap fiscal stress. Hal ini mendukung hipotesis 2 atau hipotesis diterima.

3. Variabel Pertumbuhan Ekonomi Pdrb (X3) didapatkan nilai t hitung sebesar -2,983 sehingga t hitung $-2,983 > t$ table 1,97867 dengan tingkat signifikansi 0,013 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,27, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi Pdrb berpengaruh negative signifikan terhadap fiscal stress. Hal ini mendukung hipotesis 3 atau hipotesis diterima.

4. Variabel Dana Alokasi Umum (X4) didapatkan nilai t hitung sebesar -2,802 sehingga t hitung $-2,802 > t$ table 1,97867 dengan tingkat signifikansi 0,019 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,24, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negative signifikan terhadap fiscal stress. Hal ini mendukung hipotesis 4 atau hipotesis diterima.

5. Variabel Desentralisasi Fiskal (X5) didapatkan nilai t hitung sebesar -5,316 sehingga t hitung $-5,316 > t$ table 1,97867 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh negative signifikan terhadap fiscal stress. Hal ini mendukung hipotesis 5 atau hipotesis diterima.

6. Variabel Diversifikasi Pendapatan Daerah (X6) didapatkan nilai t hitung sebesar -0,942 sehingga t hitung $-0,942 < t$ table 1,97867 dengan tingkat signifikansi 0,348 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Diversifikasi Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress. Hal ini tidak mendukung hipotesis 6.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Fiscal Stress

Hasil analisis statistik untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai t hitung $1,656 < t$ tabel 1,97867, serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,100 lebih besar dari 0,05 dan koefisien memiliki tanda positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress. Maka hipotesis pertama yang diajukan ditolak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Meta Adriana, Yessi Muthia Basri Dan Novita Indrawati (2017) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress. Hal tersebut menunjukkan pemerintah daerah belum bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya untuk menunjang kebutuhan daerah tersebut dalam hal belanja daerah. Salah satu faktornya yaitu karena pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana dari pemerintah pusat untuk memenuhi keperluan belanja daerahnya.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*, hal ini terjadi karena kabupaten/kota sangat tergantung pada pendapatan transfer. Hal tersebut bisa dilihat dalam presentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah yang sangat kecil kontribusinya. Total dari seluruh kabupaten/kota pada tahun 2015-2019 hanya 23,59% kontribusi pada terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan 76,41% pendapatan daerah berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat. Contohnya pada Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 karena pendapatan asli daerahnya hanya berkontribusi 8% dari total pendapatan daerah pada tahun tersebut yakni sebesar Rp. 243.051.180.575 dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 2.992.362.402.748. Sedangkan pendapatan transfer berkontribusi besar 88% dari total pendapatan daerah pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 2.631.880.814.457 dari total pendapatan daerah sebesar Rp.

2.992.362.402.748. Jadi dari data tersebut bisa dilihat ketika pendapatan asli daerah mengalami kenaikan atau penurunan tidak akan berpengaruh terhadap *fiscal stress* karena kontribusinya kurang maksimal.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Fiscal Stress

Hasil analisis statistik untuk variabel belanja modal menunjukkan nilai thitung 3,014 > ttabel 1,97867, serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien memiliki tanda positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Maka hipotesis kedua yang diajukan diterima.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Rian Firstanto (2015) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Dimana pengaruh positif didapat saat belanja modal rendah, tingkat *fiscal stress* juga akan rendah sehingga tekanan anggaran daerah tersebut kecil.

Hal tersebut bisa berdampak pada total belanja daerah, jika belanja modalnya rendah maka total belanja daerahnya juga akan rendah. Dalam data penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015-2019 belanja modal berkontribusi sebesar 32% terhadap total belanja daerah. Dengan tingginya belanja modal maka total belanja daerah juga akan meningkat dan kemungkinan daerah tersebut terkena *fiscal stress* juga akan tinggi. Namun sebaliknya jika belanja modalnya rendah maka total belanja daerah juga akan menurun dan kemungkinan daerah tersebut terkena *fiscal stress* juga akan kecil. Contohnya belanja modal Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 hanya Rp. 651.200.904.317 lebih rendah daripada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 723.842.704.010, hal ini diikuti dengan rendahnya *fiscal stress* di tahun 2019 sebesar Rp. 421.316.842.159 dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 225.384.303.002. Semakin kecil tingkat *fiscal stress* semakin bagus pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), karena pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menganggarkan belanja modal supaya tidak terlalu besar.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pdrb terhadap Fiscal Stress

Hasil analisis statistik untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai thitung -2,983 > ttabel 1,97867, serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,027 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien memiliki tanda negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi pdrb berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Maka hipotesis ketiga yang diajukan diterima.

Menurut Firstanto (2015) menyatakan bahwa "pertumbuhan ekonomi pdrb berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*." Menurut Muryawan dan Sukarsa (2016) juga membuktikan bahwa "*fiscal stress* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi." Perekonomian suatu daerah dinyatakan baik apabila pertumbuhan ekonomi Pdrb selalu mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Sehingga dari peningkatan tersebut pemerintah daerah dapat menambah pendapatan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pdrb kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat rata-rata mengalami pertumbuhan ekonomi pdrb sebesar 5% dari tahun 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi pdrb paling tinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 6%, sedangkan pertumbuhan ekonomi pdrb paling rendah yaitu pada tahun 2015 sebesar 5,24%. Apabila pertumbuhan ekonomi pdrb suatu daerah tersebut mengalami peningkatan maka pendapatan daerahnya akan bertambah dan kebutuhan akan belanja daerahnya juga ikut bertambah sehingga akan berdampak pada kemungkinan daerah tersebut terkena *fiscal stress*.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Fiscal Stress

Hasil analisis statistik untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai thitung $-2,802 > t_{tabel}$ 1,97867, serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien memiliki tanda negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fiscal stress. Maka hipotesis keempat yang diajukan diterima.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Khairur Ichsan (2018) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah, yang mana belanja daerah tersebut sebagai indikator penyebab fiscal stress. Kebutuhan dana alokasi umum oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan fiscal gap, yaitu ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah.

Pada umumnya dana alokasi umum ditujukan untuk membiayai belanja daerah yang melebihi dari pendapatan daerah yang ada supaya daerah tersebut tidak mengalami tekanan fiskal (fiscal stress). Hal tersebut dibuktikan dengan masih mendominasinya dana alokasi umum dalam pendapatan daerah. Dalam data penelitian didapat bahwa sekitar 40% total pendapatan daerah berasal dari dana alokasi umum pada periode 2015-2019. Contohnya pada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015, total pendapatan daerah sebesar Rp. 2.750.630.839.061 dan 50% nya bersumber dari dana alokasi umum yaitu sebesar Rp. 1.380.490.312.000. Namun setiap tahun daerah tersebut tidak akan sama menerima dana alokasi umum tergantung dengan kebutuhan daerah di tahun tersebut. Contohnya dana alokasi umum yang diterima Kabupaten Bogor pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.163.439.062.000, kemudian pada tahun 2016 berbeda yaitu sebesar Rp. 1.917.780.234.000. Hal tersebut yang kemudian bisa menimbulkan fiscal stress karena jika dana alokasi umumnya rendah maka kemungkinan mengalami fiscal stress akan besar.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Fiscal Stress

Hasil analisis statistik untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai thitung $-5,316 > t_{tabel}$ 1,97867, serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien memiliki tanda negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fiscal stress. Maka hipotesis kelima yang diajukan diterima.

Menurut Adriana, dkk (2017) menyatakan bahwa “desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap fiscal stress.” Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang mengharuskan setiap daerah untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola keuangannya terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu meningkatkan penerimaan yang bersumber langsung dari hasil kekayaan daerah. Hal ini terlihat dengan masih rendahnya pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sementara itu dana perimbangan masih mendominasi total pendapatan daerah. Berdasarkan data penelitian, presentasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih rendah, contohnya: total pendapatan daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.511.564.249.395 dan hanya 12% yang bersumber dari pendapatan asli daerah yakni sebesar Rp. 937.419.374.522. Hal tersebut yang kemudian bisa menimbulkan fiscal stress karena jika pendapatan daerahnya rendah maka kemungkinan mengalami fiscal stress akan besar.

Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Daerah terhadap Fiscal Stress

Hasil analisis statistik untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai thitung $-0,942 < t_{tabel}$ 1,97867, serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,348 lebih besar dari 0,05 dan koefisien memiliki tanda positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel diversifikasi pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap fiscal

stress. Maka hipotesis keenam yang diajukan ditolak.

Menurut Adriana, dkk (2017), menyebutkan bahwa “diversifikasi pendapatan daerah secara parsial berpengaruh negative terhadap *fiscal stress*.” Diversifikasi pendapatan daerah pada 27 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat pada jangka 5 tahun menunjukkan terjadinya peningkatan. Namun meskipun mengalami peningkatan kontribusinya masih kecil sehingga diversifikasi pendapatan daerah tidak mempengaruhi tingkat *fiscal stress*. Berdasarkan data penelitian diversifikasi pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah masih kurang maksimal dan hanya berkisar rata-rata 10% dari total pendapatan daerah. Contohnya: Kabupaten Subang sebesar Rp. 2.955.528.280.585 dan hanya 6% yang bersumber dari diversifikasi pendapatan daerah yaitu Rp. 188.227.973.000. Jadi dari data tersebut bisa dilihat ketika diversifikasi pendapatan daerah mengalami kenaikan atau penurunan tidak akan berpengaruh terhadap *fiscal stress* karena kontribusinya sangat kecil.

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi pdrb, Dana Alokasi Umum, Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Fiscal Stress

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi pdrb, dana alokasi umum, desentralisasi fiskal dan diversifikasi pendapatan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji statistik regresi yang menunjukkan bahwa nilai sig.F sebesar 0,000 dimana nilai signifikan kurang dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) yang berarti keenam variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi pdrb, dana alokasi umum, desentralisasi fiskal dan diversifikasi pendapatan daerah terhadap *fiscal stress* (studi empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019). Berdasarkan hasil olah data yang telah disajikan dalam bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fiscal stress* di 27 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini disebabkan karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih kecil sekitar 23,59%. Oleh karena itu jika PAD mengalami peningkatan atau penurunan itu tidak akan berpengaruh terhadap *fiscal stress* karena kontribusinya yang kurang maksimal.
2. Belanja Modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap *fiscal stress* di 27 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini disebabkan karena belanja modal memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total belanja daerah yakni sebesar 32%. Hal tersebut menyebabkan jika belanja modalnya rendah maka total belanja daerahnya juga akan rendah. Dengan rendahnya total belanja daerah, maka kemungkinan daerah tersebut terkena *fiscal stress* kecil.
3. Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *fiscal stress* di 27 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 5%. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan PDRB yang naik dan turun sehingga dapat mempengaruhi kondisi pendapatan dan belanja di suatu daerah, apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut mengalami peningkatan maka pendapatan daerahnya akan bertambah dan kebutuhan akan belanja daerahnya juga ikut bertambah sehingga akan

berdampak pada kemungkinan daerah tersebut terkena *fiscal stress*.

4. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *fiscal stress* di 27 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini ditunjukkan dengan dana alokasi umum yang masih mendominasi terhadap pendapatan daerah dan membantu daerah dalam mengatasi tingkat *fiscal stress*.

5. Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress* di 27 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal bisa membantu daerah dalam mengatasi tingkat *fiscal stress*. Meskipun secara rata-rata Desentralisasi Fiskal di setiap daerah masih kecil dari tahun 2015 sampai dengan 2019, namun upaya pemerintah tetap harus ditingkatkan lagi supaya pendapatan daerah terus meningkat setiap tahunnya.

6. Diversifikasi Pendapatan Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress* di 27 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini disebabkan karena Diversifikasi Pendapatan Daerah masih kurang berkontribusi terhadap pendapatan daerah, dalam data penelitian didapatkan bahwa hanya sekitar 10% dari total pendapatan daerah. Hal tersebut yang menyebabkan diversifikasi pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah LKPD yang diteliti serta menambah jumlah periode menjadi lebih banyak setidaknya lima atau enam tahun periode supaya dapat meningkatkan jumlah data yang diteliti.

- b. Untuk memperluas penelitian hendaknya peneliti selanjutnya menambah variabel baru yang terkait dengan *fiscal stress*.
2. Bagi pemerintah
 - a. Dengan menerapkan otonomi daerah yaitu desentralisasi fiskal, diharapkan pemerintah daerah bisa memaksimalkan potensi yang ada di setiap daerahnya untuk menambah pendapatan asli daerahnya.
 - b. Untuk menghadapi tingkat *fiscal stress* pemerintah daerah harus lebih teliti lagi dalam membuat anggaran yang akan diajukan untuk tahun selanjutnya. Antara pendapatan dan belanja harus seimbang supaya tidak terjadi ketimpangan.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Adapun keterbatasan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Populasi hanya terkonsentrasi pada Provinsi Jawa Barat
2. Penggunaan variabel penelitian yang sudah banyak diteliti dalam penelitian lain.
3. Masih adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi *fiscal stress*.

REFERENCES

- Adriana, M., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2017). VARIABEL YANG MEMPENGARUHI FISCAL STRESS DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU. *Jurnal Ekonomi*, Volume 25.
- Afiyah, N. N. (2010). *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, Jakarta.
- Dr. Indra Bastian, M. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*.

- Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Firstanto, R. (2015). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PAD, PDRB, DAN BELANJA MODAL TERHADAP FISCAL STRESS PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *Pengertian Diversifikasi*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diversifikasi>
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta.
- Muda, I. (2012). VARIABEL YANG MEMPENGARUHI FISCAL STRESS PADA KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA. *Jurnal keuangan & Bisnis*, Volume 4, No.1.
- Muryawan, Sang Made & Sukarsa, Made. 2016. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.2 (2016) : 229-252.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2018). *OTONOMI & MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH*. Jakarta: Penerbit ANDI.
- Shamsub, H., & Akoto, J. (2004). State and local fiscal structures and fiscal stress. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 16 Issue: 1, pp.40-61.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Suparmoko. (1990). *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta.
- Susilowati, S. H. (2017). DINAMIKA DIVERSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERDESAAN DI BERBAGAI AGROEKOSISTEM. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 35, 105-126.
- Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Yan. Wenli. 2012. *The Impact of Revenue Diversification and Economic Base on State Revenue Stability*. *J. of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 24 (1), 58-81.